



KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSES PELIMPAHAN WALI NIKAH
DALAM KEABSAHAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA
PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN
DI KABUPATEN FAK-FAK

JURIDICAL STUDY CONCERNING THE PROCESS OF ASSIGNMENT OF
MARRIAGE GUARDIANS IN THE VALIDITY OF MARRIAGES AFTER THE
ENTRANCE OF PMA NUMBER 20 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE
REGISTRATION IN FAK-FAK REGENCY

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh :

YAHYA IRIYANTO SARWADAN
NIM : 2022025015099

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA - PAPUA
2024

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSES PELIMPAHAN
WALI NIKAH DALAM KEABSAHAN PERKAWINAN
SETELAH BERLAKUNYA PMA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI
KABUPATEN FAKFAK

NAMA : YAHYA IRIYANTO SARWADAN

NPM : 2022025015099

PROGRAM : MAGISTER ILMU HUKUM

STUDI

**Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : 6 Juli 2024**

Menyetujui

Pembimbing I



(Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum.)
NIP. 19660720 199303 2 003

Pembimbing II



(Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum.)
NIP. 19671108 199403 1 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



(Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.)

NIP. 19660302 199303 1 002

LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN

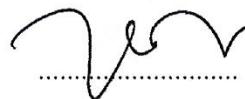
KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSES PELIMPAHAN WALI NIKAH
DALAM KEABSAHAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA
PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
DI KABUPATEN FAK-FAK

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, 09 Juli 2024

Ketua : Dr. Y.D.W, Susi Irianti, S.H., M.Hum.
NIP. 19660720 199303 2 003



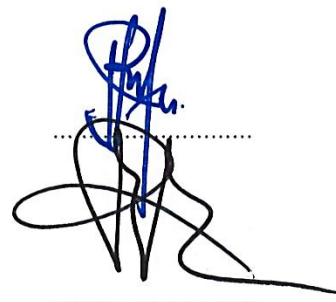
Sekretaris : Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum.
NIP. 19671108 199403 1 004



Anggota : Dr. Herry M. Polontoh, S.H.,M.Hum
NIP. 19610330 199003 1 006



Anggota : Rehabeam Mofu, S.H.,M.H
NIP. 19590718 199303 1 001



Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

ABSTRAK

YAHYA IRIYANTO SARWADAN, 2024. Kajian Yuridis Tentang Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan Setelah Berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kabupaten Fak-fak. (dibimbing oleh Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Pelaksanaan setelah berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Di Kabupaten Fak-fak, dan mengetahui dan menganalisis Efektivitas Berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pada Proses pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan di Kabupaten Fak-fak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris.. Pendekatan yuridis ivormative adalah penelitian yang berkaitan dengan telaah dari aspek aturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pelimpahan wali nikah dalam keabsahan perkawinan yang dilangsungkan berjalan efektif dalam prakteknya pada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan proses pelimpahan wali nikah dalam keabsahan perkawinan setelah berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mengalami perubahan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) menentukan bahwa apabila terjadi peralihan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim haruslah dilaksanakan dengan membuat surat taukil nikah secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai. Pentingnya pelimpahan wali nikah karena keberadaan wali harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali nikah tidak mungkin perkawinan dilaksanakan. Berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan belum berjalan secara efektif, terutama penerapan Pasal 12 ayat (5) yang mengatur tentang keharusan adanya surat taukil nikah yang dibuat secara tertulis dan dtandatangani diatas meterai dalam pelaksanaan pelimpahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim. Hal ini sesuai dengan data lapangan yang menunjukkan bahwa dalam prakteknya masih banyak pelaksanaan pelimpahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim yang tidak disertai dengan adanya surat taukil nikah. Belum efektifnya Peraturan Menteri Agama tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: a. Faktor Hukumnya yakni Peraturan Menteri Agama itu sendiri, b. Faktor Penegak Hukum dalam hal ini Kepala KUA c. Faktor Masyarakat seperti wali nasab yakni orangtua dan keluarga, d. Faktor Budaya yakni kesadaran hukum dari masyarakat akan pentingnya wali nikah, serta e. Faktor Sarana dan Prasarana yakni keberadaan KUA tempat untuk mendaftarkan perkawinan lokasinya jauh dari tempat tinggal Masyarakat.

Kata Kunci : Proses Pelimpahan Wali Nikah, Keabsahan Perkawinan, KUA PMA Nomor 20 Tahun 2019, Kabupaten Fak-Fak

ABSTRACT

YAHYA IRIYANTO SARWADAN, 2024. Juridical Study Concerning The Process Of Assignment Of Marriage Guardians In The Validity Of Marriages After The Entrance Of Pma Number 20 Of 2019 Concerning Marriage Registration In Fak-Fak Regency (supervised by Dr. YDW Susi Irianti, SH, M.Hum., as Supervisor I and Dr. Sobardo Hamonangan, SH, M.Hum., as Supervisor II). This research aims to find out and analyze the Process of Delegating Marriage Guardians in the Validity of Implementation after the enactment of PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration in Fak-Fak Regency, and knowing and analyzing the Effectiveness of the Implementation of PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration in the Process of Delegating Marriage Guardians in The Validity of Marriage in Fakfak Regency.

The approach method used in this research is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The normative juridical approach is research related to the study of aspects of statutory regulations related to the problem under study, while the empirical juridical approach is used to see the extent of statutory regulations, which relates to the process of delegating marriage guardians to the validity of marriages that are taking place effectively in practice in society.

The results of the research show that the implementation of the process of delegating marriage guardians in the legality of marriages after the enactment of PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration has undergone changes, where based on the provisions of Article 12 paragraph (5) it is determined that if there is a transfer of marriage guardians from guardians of lineage to guardians of judges it must be carried out with make a marriage certificate in writing and sign it on a stamp. The importance of assigning a marriage guardian is because the presence of a guardian must be present in the marriage, without a marriage guardian it is impossible for the marriage to take place. The implementation of PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration has not been implemented effectively, especially the application of Article 12 paragraph (5) which regulates the requirement for a marriage certificate to be made in writing and signed on a stamp in the implementation of the delegation of marriage guardianship from the guardian of the lineage to the guardian of the judge. This is in accordance with field data which shows that in practice there are still many implementations of the delegation of marriage guardianship from the nasab guardian to the judge guardian which are not accompanied by a marriage certificate. The ineffectiveness of the Regulation of the Minister of Religion is caused by several factors, including: a. The legal factor is the Regulation of the Minister of Religion itself, b. Law Enforcement Factor, in this case the Head of the KUA, c. Community factors such as lineage guardians, namely parents and family, d. Cultural factors, namely legal awareness of the community regarding the importance of marriage guardians, and e. The Facilities and Infrastructure factor, namely the existence of a KUA place to register marriages, is located far from where the community lives.

Keywords: Process of Delegating Marriage Guardian, Marriage Validity, KUA PMA Number 20 of 2019, Fak-Fak Regency

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

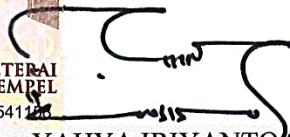
Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, 09 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,




YAHYA IRIYANTO SARWADAN
NIM : 2022025015099

MOTTO DAN PESEMBAHAN

MOTTO : “Menyesali Nasib Tidak Akan Mengubah Kedaan, Tersus Berkarya Dan Bekerjalah Yang Membuat Kita Berharga “. (Gus Dur)

“ Percaya Dan Yakin Pada Diri Sendiri Merupakan Cara Paling Efektif Untuk Meraih Kesuksesan” (Yahya Iriyanto Sarwadan)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku terkasih, Ayah H. Zakaria Sarwadan, S.Ag., dan Ibunda Hj. Amirul Mukminin yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta doa-doanya yang tak kunjung berkesudahan;
2. Isteriku tercinta, Farah Diba Kastella, S.Kom. yang senantiasa memberikan dukungan dan motifasi bagi penulis dalam melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura,
3. Anakku tersayang, Wildan Navid Khairy Sarwadan, Khansa Adiva Fairuz Sarwadan, dan Shanum Malika Almahira Sarwadan, yang menjadi motifasi dan kebanggaanku;
4. Saudara-saudariku terkasih, Zahrotul Laila Sarwardan, S.Pd, Muhammad Guntur Sarwardan, S.Farm., M.Si., Haliati Miftahul Amalia Sarwardan, S.Pd., dan Jumbuh Zamawi Sarwadan ;
5. Semua teman-teman pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Tahun Angkatan 2022/2023
6. Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SAW atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai melindungi penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis tepat pada waktunya.

Tesis yang berjudul :” Kajian Yuridis Tentang Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Di Kabupaten Fak-fak” adalah merupakan wujud nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi pada Program Sudi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis tidak dapat memungkiri bahwa apa yang teruraikan dalam Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karenanya penulis sadar sungguh bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini banyak mendapat masukan yang yang berguna dari berbagai pihak. Untuk itu semua penulis berdoa semoga rahmat-Nya senantiasa diberikan kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Pada kesempatan ini Penulis juga penulis tak lupa mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih,

2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih,
4. Ibu Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan sumbangsih pemikiran berupa arahan dan bimbingan sehingga penulisan Tesis ini sukses terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bapak Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna dalam penyelesaian Tesis ini,
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu kepada penulis selama masa studi.
7. Seluruh Tenaga Administrasi Civitas Akademika Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberi bantuan dalam proses administrasi dan registrasi selama masa studi sampai pada penyelesaian studi ini.
8. Para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Fak-fak, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Tesis ini.
9. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama Islam, serta msyarakat Fak-fak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala

bantuannya untuk memberikan data dan keterangan yang penulis butuhkan dalam penyusunan Tesis ini,

Akhir kata, semoga Karya Tulis yang belum sempurna ini tetap dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para mahasiswa hukum khususnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Jayapura,... Juli 2024
Penulis,

Yahya Iriyanto Sarwadan

DAFTAR ISI

Judul	I
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pelaksanaan Ujian	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Pernyataan Orisinalitas	vi
Motto dan Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	12
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam	25
C. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah	27
D. Teori Efektivitas Hukum	37
E. Teori Utilitarianisme	50
F. Teori Kepastian Hukum	52

G. Kerangka Pikir	54
H. Bagan Kerangka Pikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Metode Pendekatan	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Populasi dan Sampel	58
E. Jenis Dan Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data	61
G. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Pelaksanaan Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Di Kabupaten Fakfak	63
B. Efektivitas Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pada Pelaksanaan Proses Pelimpahan Wali Nikah Dalam Keabsahan Perkawinan Di Kabupaten Fak-fak	77
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108